

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Partisipasi politik penuh dan efektif oleh kaum perempuan termasuk dalam masalah hak asasi manusia, pertumbuhan inklusi dan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan politik perempuan merupakan syarat esensial demokrasi pemerintahan dan dapat diukur baik dari segi hak hukum yang diberikan kepada perempuan untuk bisa memilih, mengekspresikan pendapat, dan mencalonkan diri untuk jabatan terpilih serta dalam pelaksanaan praktis dari hak-hak hukum. Berpartisipasi dalam lembaga publik seperti parlemen, dewan lokal atau pemerintahan memungkinkan perempuan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pembuatan hukum yang nantinya akan berdampak pada hak, perilaku dan hidup.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh UN Women dan NCW dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Mesir menghasilkan berbagai program yang sangat membantu meningkatkan peran perempuan di ruang publik. Kerjasama antara UN Women dan NCW dilakukan dalam berbagai bidang yang kemudian menjadi penunjang untuk keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan di Mesir.

UN Women mendorong pemerintah Mesir melalui NCW untuk menciptakan kerjasama-kerjasama bersama mitra-mitra nasional maupun internasional. Melalui program *Women Political Empowerment* (WPE), UN Women telah memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk memosisikan dirinya secara strategis untuk mengkatalisasi, melengkapi, dan memastikan kohersi upaya atas dasar mitra pembangunan dan pemerintah dalam menerjemahkan komitmen untuk memperkuat kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta membuat posisi dan proses menjadi kebijakan dan tindakan nyata di tingkat nasional dan lokal.

Kerangka kelembagaan sangat penting dalam implementasi kerangka hukum, atau komitmen politik, yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan partisipasi politik perempuan dan kesetaraan gender secara lebih luas. Hampir di seluruh negara, pemerintah cenderung menempatkan tanggung jawab untuk memajukan kesetaraan gender dengan berfokus pada gender institusi seperti kementerian terkait atau komisi hak asasi manusia. Di Mesir, banyak dari tanggung jawab ini dilimpahkan kepada *National Council for Women* (NCW) walaupun tetap bermitra dengan berbagai lembaga nasional lainnya.

Penelitian ini juga menganalisis praktik dari konsep kerjasama internasional pada kerjasama yang dilakukan oleh UN Women dan NCW dimana kerjasama internasional sangat diperlukan dan berpengaruh penting dalam membantu negara untuk bekerjasama mencapai kepentingannya. Kerjasama UN Women dan NCW merupakan pengamalan implementasi UN Women telah menjalankan fungsi organisasi internasional. UN Women mengutamakan prinsip-prinsip mandat yaitu keterlibatan dengan semua anggota tim secara inklusif dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil terbaik. Dalam menguatkan fungsi dan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir maka dilakukan kerjasama antara organisasi Internasional yaitu UN Women dengan organisasi independen milik Mesir yaitu NCW.

Kerjasama internasional antara UN Women dan NCW dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik karena dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan terhadap partisipasi politik perempuan di Mesir. Masyarakat juga menjadi lebih peduli mengenai isu-isu kesetaraan gender. Program WPE juga terbukti telah memberdayakan perempuan dalam setiap kegiatan publik khususnya politik. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan pemegang kekuasaan di Mesir, WPE mendorong terciptanya regulasi-regulasi yang membantu pemberdayaan politik perempuan.

Kampanye-kampanye yang dilakukan mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan karena timbul sikap toleransi dan menghargai hak-hak perempuan.

**Andrea Aletta, 2023**

**KERJASAMA UN WOMEN DAN NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR (2017-2022)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Dengan menggandeng para pemuka agama, persepsi yang salah mengenai kaum perempuan bisa dihilangkan sehingga kaum lelaki yang menganut keras budaya patriarki menjadi tereduksi.

## **6.2 Saran**

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kerjasama organisasi internasional yaitu UN Women dan National Council for Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan.

### **6.2.1 Saran Teoritis**

Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran organisasi internasional dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam hal kebutuhan akademis terutama yang berkaitan dengan peran organisasi internasional, partisipasi politik perempuan, kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan gender untuk memenuhi hak-hak perempuan dalam ruang publik.

### **6.2.1 Saran Praktis**

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa saran dan juga rekomendasi yang ditujukan pada pihak-pihak terkait yaitu pemerintah Mesir, khususnya untuk lebih meningkatkan dukungan terhadap kerjasama antara organisasi internasional dengan organisasi nasional. Kerjasama UN Women dan NCW melalui program WPE juga menekankan pentingnya pemerintah Mesir untuk bisa lebih peka lagi terhadap isu gender.

Lembaga politik khususnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas harus peka terhadap isu gender. Parlemen yang bertransformasi menjadi lebih peka terhadap isu gender akan menghasilkan kebijakan dan output hukum yang ramah terhadap perempuan. Partai-partai politik dan badan penyelenggara pemilu harus bisa mengutamakan kesetaraan gender dalam setiap operasi kegiatan mereka.

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi politik di Mesir, disarankan kepada DPR, partai politik dan komisi pemilihan umum untuk:

- Mempertimbangkan mekanisme untuk memperkuat kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan, semua wilayah yuridiksi termasuk mengadopsi target-target untuk bisa merepresentasikan perempuan.
- Mempertimbangkan untuk menyertakan referensi eksplisit mengenai pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam proses rekrutmen, seleksi dan pengangkatan staf atau anggota komite dalam aturan internal dan prosedur, pernyataan misi dan anggaran rumah tangga.
- Memastikan setiap materi komunikasi, publikasi, pedoman, kebijakan dan undang-undang untuk menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti yang peka terhadap isu gender.
- Mengembangkan mekanisme yang memadai untuk diterapkan pada proses pengarusutamaan gender, termasuk institusi dan kemitraan yang berfokus pada gender seperti NCW dalam departemen pemerintahan.
- Memastikan bahwa tanggung jawab terhadap kesetaraan gender disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh anggota, staf organisasi pria dan perempuan untuk menerapkan strategi kesetaraan gender secara merata.
- Melakukan pelatihan kesetaraan gender untuk seluruh anggota dan staf lembaganya.

Pemantauan dan evaluasi berdasarkan metode yang ketat adalah landasan untuk mengidentifikasi kemajuan yang dibuat untuk mencapai tujuan

Strategi. Hal tersebut hanya bisa dicapai dengan menghubungkan secara dekat tujuan umum dan tujuan rinci dengan indikator-indikatornya yang relevan, secara sistematis yang didasarkan pada keakuratan dan sistem data yang diperbarui.

Pemerintah Mesir diharapkan mampu untuk bisa segera mengatasi kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan seperti Pendidikan, ekonomi, pekerjaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan. Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan harus juga disosialisasikan dengan baik.

Pelaksanaan kerjasama dan berbagai strategi membutuhkan kerangka kelembagaan yang kuat yang menjamin pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kemudian program yang akan diadopsi bisa segera dicapai. Oleh karena itu, NCW bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola kerangka kelembagaan dan koordinasi mekanisme, tidak hanya memantau pelaksanaan dan hasil dari strategi kerja sama.

Kemudian, UN Women diharapkan mampu memmpertluas kerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah atau LSM. UN Women perlu melibatkan lebih banyak aktor-aktor lain untuk mendukung dan memperluas kerjasama strategis yang dapat membantu meningkatkan partisipasi politik perempuan.